

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 61 Tahun 2011

TANGGAL : 20 September 2011

KEGIATAN PENDUKUNG  
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

I. BIDANG PERTANIAN

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sistem pengelolaan air pada daerah irigasi</li> <li>• Tersedianya <i>prototype</i> sistem pengelolaan air pada daerah irigasi di lokasi percontohan</li> <li>• Terlaksananya evaluasi <i>prototype</i> sistem pengelolaan air di daerah irigasi</li> <li>• Tersusunnya standar/pedoman pengelolaan air pada daerah irigasi</li> </ul>	2010-2014	Provinsi Jabar	Kementerian Pekerjaan Umum

2. Penelitian...

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
2.	Penelitian metode pengurangan emisi GRK di Waduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya nilai emisi GRK di Waduk</li> <li>▪ Tersedianya metode pengurangan emisi GRK</li> <li>▪ Terlaksananya uji coba metode pengurangan emisi GRK</li> <li>▪ Tersusunnya pedoman metode pengurangan emisi GRK di Waduk</li> </ul>	2010-2014	3 provinsi: Jabar, Jateng, dan Jatim	Kementerian Pekerjaan Umum
3.	Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi <i>Measurable, Reportable, Verifiable</i> (MRV) sektor pertanian (non gambut)	Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV untuk sektor pertanian yang diterapkan dalam 12 paket tanaman pangan, 12 paket peternakan, 8 paket tanaman perkebunan, dan 2 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian	2011-2014	Seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta	Kementerian Pertanian
4.	Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar	Terlaksananya pembukaan lahan tanpa bakar melalui pembuatan kompos, arang dan briket arang di lahan seluas 1.800 ha	2010-2020	7 provinsi: Riau, Sumut, Jambi, Sumsel, Kaltim, Kalteng, dan Kalbar	Kementerian Lingkungan Hidup

## II. BIDANG KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut	Tersusunnya laporan hasil survey dan pengumpulan data hidrologi dan geologi pada lahan bergambut di 5 provinsi	2010-2014	5 provinsi: Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel	Kementerian Pekerjaan Umum
2.	Identifikasi lahan rawa untuk budidaya dan konservasi	Teridentifikasinya lahan rawa untuk budidaya dan konservasi	2010-2014	5 provinsi: Sumsel, Riau, Jambi, Kalsel, dan Kalteng	Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Pekerjaan Umum
3.	Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya sistem tata air lahan gambut</li> <li>▪ Tersedianya <i>prototype</i> sistem tata air lahan gambut pada lokasi percontohan.</li> <li>▪ Terlaksananya evaluasi <i>prototype</i> di sistem tata air lahan gambut</li> <li>▪ Tersusunnya standar/ pedoman tata air lahan gambut</li> </ul>	2010-2014	2 pulau: Kalimantan dan Sumatera	Kementerian Pekerjaan Umum
4.	Penyusunan Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Tata Ruang (RTR) pulau	Tersusunnya 69 Perpres KSN dan 7 RTR Pulau	2010-2014	7 pulau: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
5.	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sungai	Tersusunnya RTRW 69 wilayah sungai	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum
6.	Audit tata ruang ( <i>stock taking</i> ) wilayah provinsi	Terlaksananya audit tata ruang sebanyak 18 kegiatan	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum
7.	Pendataan dan informasi bidang penataan ruang	Terlaksananya 22 kegiatan pendataan dan informasi bidang penataan ruang	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum
8.	Monitoring evaluasi RTRW Nasional dan pulau dan program infrastruktur nasional	Terlaksananya 26 kegiatan monitoring evaluasi RTRW Nasional dan pulau serta program infrastruktur nasional	2010-2014	Nasional	Kementerian Pekerjaan Umum
9.	Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terfasilitasinya penyusunan 31 Perda RTRW Provinsi dan 497 Perda RTRW Kabupaten/Kota	2010-2014	31 provinsi dan 497 Kabupaten/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
10.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian Kehutanan
		Tercapainya target wajib bayar tertib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% per tahun	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian Kehutanan
		Tersedianya data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian Kehutanan
		Tersedianya Peraturan Perundangan tentang Penggunaan Kawasan Hutan	2010-2014	Nasional	Kementerian Kehutanan
11.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (SDH)	Tersedianya data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional	2010-2014	Nasional	Kementerian Kehutanan
		Tersedianya data dan informasi pendugaan karbon kawasan hutan tingkat nasional, untuk perhitungan karbon hutan per tahun (5 kali pembaharuan)	2010-2014	Nasional	Kementerian Kehutanan
		Tersedianya basis data spasial SDH yang terintegrasi sebanyak 5 kali pembaharuan	2010-2014	Nasional	Kementerian Kehutanan
12.	Penelitian dan pengembangan kebijakan perubahan iklim kehutanan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan di bidang kebijakan perubahan iklim kehutanan	2010-2014	Nasional	Kementerian Kehutanan

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
13.	Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut	Tersusunnya kriteria baku kerusakan kawasan lindung kubah gambut dan kriteria baku kerusakan kawasan budidaya gambut	2010-2014	Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup
14.	Penyusunan <i>Master Plan</i> Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi	Tersusunnya <i>Master Plan</i> Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi di 10 wilayah provinsi	2010-2015	10 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Papua, dan Papua Barat	Kementerian Lingkungan Hidup
15.	Inventarisasi dan pemetaan kesatuan hidrologis ekosistem gambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya dokumen data dan informasi kesatuan hidrologis ekosistem gambut</li> <li>▪ Tersusunnya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dengan skala sekurang-kurangnya 1 : 250.000 pada lahan seluas 20 juta ha</li> </ul>	2010-2014	10 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Papua, dan Papua Barat	Kementerian Lingkungan Hidup
16.	Inventarisasi dan pemetaan karakteristik ekosistem gambut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya dokumen data dan informasi karakteristik ekosistem gambut</li> <li>▪ Tersusunnya Peta Karakteristik Gambut dengan skala 1 : 100.000 pada lahan seluas 20 juta ha</li> </ul>	2010-2014	10 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Papua, dan Papua Barat	Kementerian Lingkungan Hidup
17.	Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut	Terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut sebanyak 12 paket teknologi	2011-2014	11 provinsi: NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Papua	Kementerian Pertanian

### III. BIDANG ENERGI DAN TRANSPORTASI

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi	Terlaksananya monitoring pasokan gas bumi sebanyak 5 paket	2010-2014	6 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua	Kementerian ESDM
		Terlaksananya monitoring pasokan gas bumi sebanyak 5 paket	2015-2020	6 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua	Kementerian ESDM
2.	Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas <i>flare</i>	Tersedianya data volume pembakaran gas <i>flare</i> per tahun hasil pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas <i>flare</i>	2010-2014	Seluruh Indonesia	Kementerian ESDM
3.	Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 900 orang</li> <li>▪ Terlaksananya Bimtek konservasi energi sebanyak 850 orang</li> <li>▪ Tersusunnya studi kelayakan energi laut sebanyak 5 laporan</li> </ul>	2010-2014	Seluruh Indonesia	Kementerian ESDM

▪ Tersusunnya...

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersusunnya laporan <i>pilot project</i> pembangkit listrik dari sumber energi laut sebanyak 10 laporan</li> <li>▪ Tersusunnya laporan pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga sebanyak 5 laporan</li> </ul>			
4.	Penyediaan regulasi panas bumi dan air tanah	Tersusunnya 50 regulasi panas bumi dan air tanah	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian ESDM
		Tersusunnya 20 regulasi panas bumi dan air tanah	2015-2020	Seluruh provinsi	Kementerian ESDM
5.	Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi	Tersedianya data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian ESDM
6.	Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi	Ditetapkannya 30 Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi	2010-2014	5 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku	Kementerian ESDM
		Ditetapkannya 20 Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi	2015-2020	5 pulau: Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku	Kementerian ESDM



NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
7.	Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam pemakaian bahan bakar total	Tersedianya data prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian ESDM
8.	Pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG	Tersusunnya 5 laporan studi kebijakan penetapan harga LPG untuk <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan non PSO	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian ESDM
9.	Perhitungan dan <i>updating</i> faktor emisi pada sistem <i>grid</i> ketenagalistrikan	Terlaksananya perhitungan dan <i>updating</i> faktor emisi pada 8 <i>grid</i> interkoneksi	2010-2020	8 lokasi: Jawa-Bali, Kalimantan (3 sistem), Sulawesi (2 sistem), Batam, dan Sumatera	Kementerian ESDM
10.	Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut	Terlaksananya penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang tenaga laut yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Femodelan listrik</li> <li>▪ <i>Prototype</i> pembangkit listrik tenaga gelombang laut</li> <li>▪ Evaluasi <i>prototype</i></li> </ul>	2010-2014	Selat Bali	Kementerian Pekerjaan Umum

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
11.	Pengujian seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bagi Kota/Kab yang belum memiliki unit PKB</li> <li>▪ Terlaksananya pengujian seluruh kendaraan bermotor setiap tahun agar seluruh kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas emisi, tidak dapat beroperasi di jalan</li> </ul>	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian Perhubungan
12.	Penerapan standar emisi CO2 untuk mobil penumpang	Terlaksananya penerapan standar emisi CO2 yang mulai untuk diaplikasikan pada kendaraan baru di Indonesia	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian Perhubungan
13.	Pengembangan sistem logistik modern	Terlaksananya 9 paket sistem logistik modern (1 tahun 1 paket) untuk mengurangi angka km perjalanan	2010-2020	12 kota: Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin	Kementerian Perhubungan
14.	Penerapan <i>Car Labeling</i>	Terlaksananya pemberian label kepada semua kendaraan baru menurut konsumsi bahan bakar (per 100km) dan emisi CO2 (dalam g/km)	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian Perhubungan

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
15.	Pembatasan kecepatan pada jalan tol	Terlaksananya pembatasan kecepatan pada seluruh jalan tol untuk menurunkan emisi sebesar 0,07 Juta Ton CO <sub>2</sub> e	2010-2014	Seluruh jalan tol	Kementerian Perhubungan
16.	Penerapan pajak kendaraan berdasarkan tingkat emisi CO <sub>2</sub>	Terlaksananya penerapan pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO <sub>2</sub> e) pada kendaraan pribadi setiap 5 tahun yang dapat digunakan untuk manfaat pengembangan sistem angkutan umum	2010-2014	Seluruh provinsi	Kementerian Keuangan
17.	Penanaman pohon	Penanaman pohon sepanjang 10.000 km	2010-2014	Jalan nasional di seluruh Indonesia, terutama jalan perkotaan	Kementerian Pekerjaan Umum

#### IV. BIDANG INDUSTRI

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO <sub>2</sub> di industri semen dan baja	Tersusunnya kebijakan teknis pengurangan emisi CO <sub>2</sub> di 2 sektor industri yaitu semen dan baja	2010 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 perusahaan industri semen di 9 provinsi: NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel</li> <li>• Industri baja di 8 provinsi: Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Kalbar, Kalsel, dan Sulsel</li> </ul>	Kementerian Perindustrian
2.	Fasilitasi dan insentif pengembangan teknologi <i>low carbon</i> dan ramah lingkungan di industri semen dan baja	Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif teknologi low carbon di 25 industri yaitu 9 industri semen dan 16 industri baja	2010 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 perusahaan industri semen di 9 provinsi: NAD, Sumbar, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Sulsel, dan Kalsel</li> <li>• Industri baja di 8 provinsi: Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Kalbar, Kalsel, dan Sulsel</li> </ul>	Kementerian Perindustrian

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
3.	Penyusunan dan pengembangan roadmap/peta jalan “ <i>Green Industry</i> ” dan implementasinya	Tersusunnya kebijakan Peta Jalan <i>Green Industry</i> dan implementasi pada 5 kawasan industri dan 8 sektor industri	2010–2020	5 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara	Kementerian Perindustrian
4.	Peningkatan <i>capacity building</i> bagi aparat pemerintah dan pelaku industri	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pelaku industri dalam Perubahan Iklim melalui pelatihan di 5 pulau	2010–2014	2 pulau: Sumatera dan Jawa	Kementerian Perindustrian
			2015–2020	3 pulau: Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara	Kementerian Perindustrian
5.	Implementasi <i>Standard of EURO IV</i> untuk kendaraan bermotor baru	Terimplementasinya Standar Kendaraan EURO IV pada 1 sub sektor industri transportasi untuk menurunkan emisi 5%	2010–2014	4 provinsi: DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim	Kementerian Perindustrian
			2015–2020	3 provinsi: Sumut, Banten, dan Sulsel	Kementerian Perindustrian
6.	Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri	Tersusunnya sistem data base dan inventori pengurangan emisi CO2 di 8 sektor industri (pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, kimia dasar, dan logam non baja)	2010–2020	5 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku	Kementerian Perindustrian

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
7.	Pemantauan dan evaluasi program mitigasi	Terlaksanannya pemantauan dan evaluasi program mitigasi untuk 12 industri (semen, baja, pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, logam non baja, transportasi, kimia, dan elektronika) sebanyak 50 perusahaan	2010–2020	6 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku	Kementerian Perindustrian
8.	Penerapan <i>International Organization for Standardization</i> (ISO) 50001 tentang konservasi energi dan monitoring pelaksanaan manajemen energi di sektor industri	Terlaksanannya manajemen energi dan terciptanya auditor energi pada 9 sektor industri (pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, logam non baja, transportasi, kimia dasar, dan elektronika)	2010–2020	6 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku	Kementerian Perindustrian
9.	Penyusunan <i>Roadmap</i> Emisi CO2 sektor industri	Tersusunnya Peta Jalan ( <i>Road Map</i> ) Pengurangan emisi CO2 pada 8 sektor industri (pulp dan kertas, gelas dan keramik, pupuk, petrokimia, makanan dan minuman, tekstil, kimia dasar, logam non baja, transportasi, kimia, dan elektronika)	2010–2020	6 pulau: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku	Kementerian Perindustrian

## V. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Pelaksanaan inventarisasi GRK	Terlaksananya inventarisasi GRK untuk pengelolaan limbah di 372 kota selama 5 tahun.	2010-2014	11 kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil	Kementerian Lingkungan Hidup
2.	Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka ( <i>open burning</i> ) sampah	Terlaksananya pengawasan kegiatan pembakaran terbuka sampah di 372 kota	2010-2020	11 kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil	Kementerian Lingkungan Hidup
3.	Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSFK) pengelolaan sampah di 30 kabupaten/kota</li> <li>▪ Pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di 150 kabupaten/kota</li> <li>▪ Pembinaan kelembagaan (organisasi, Sumber Daya Manusia, peran masyarakat) di 150 kabupaten/kota</li> <li>▪ Fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola investasi persampahan di 15 kabupaten/kota</li> </ul>	2010-2014	150 kabupaten/kota	Kementerian Pekerjaan Umum
4.	Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan untuk bahan pembuatan kompos, arang dan briket arang	Pembuatan kompos, arang dan briket arang di 3 provinsi seluas 1800 ha	2010-2020	3 provinsi: Jambi, Sumsel, dan Kaltim	Kementerian Lingkungan Hidup

VI. BIDANG KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
<b>A. BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)</b>					
1.	Pembangunan stasiun <i>Global Atmospheric Watch (GAW)</i>	Terlaksananya pembangunan stasiun GAW di 2 stasiun/ 2 lokasi untuk pengukuran besaran ambient kadar CO2 di wilayah atmosfer Indonesia	2010 - 2014	2 provinsi: Sulteng dan Papua	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
2.	Pembangunan Sistem Informasi Peringatan Dini Kualitas Udara untuk informasi tingkat bahaya kebakaran	Terlaksananya pembangunan Sistem Informasi Peringatan Dini Kualitas Udara di 8 lokasi/kota untuk pemantauan kualitas udara wilayah rawan kebakaran hutan	2010 - 2014	8 kota: Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
3.	Sistem Peringatan Dini Perubahan Iklim ( <i>Climate Early Warning System (CEWS)</i> )	Terlaksananya pembangunan 16 paket CEWS untuk peringatan El Nino dan La Nina sebagai peringatan dini kebakaran hutan	2010 - 2014	Seluruh provinsi	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
4.	Pengembangan <i>Fire Danger Rating System (FDRS)</i>	Terlaksananya pengembangan paket FDRS untuk pengukuran tingkat kebakaran dari informasi cuaca untuk peringatan dini harian kebakaran hutan	2010 - 2014	Seluruh provinsi	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

B. KEMENTERIAN ...



NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
<b>B. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP</b>					
1.	Menuju Indonesia Hijau	Terlaksananya identifikasi kawasan tutupan lahan Indonesia, dan penetapan daerah dengan tutupan lahan baik	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup
2.	Pengelolaan Tata Lingkungan	Tersusunnya satu paket kebijakan tata lingkungan pemetaan ekosistem untuk perencanaan lingkungan	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup
3.	Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN)	Tersusunnya sistem inventarisasi GRK Nasional	2010-2020	Seluruh provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup
4.	Pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan	Terlaksananya pemetaan kesatuan hidrologi gambut dan inventarisasi karakteristik gambut di lahan gambut seluas 15 Juta Ha	2010-2020	7 provinsi: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel	Kementerian Lingkungan Hidup
		Terwujudnya pengembangan <i>aquaculture</i> di lahan gambut secara berkelanjutan seluas 4.000 Ha	2010-2020	4 provinsi: Jambi, Riau, Kalteng, dan Kalbar	Kementerian Lingkungan Hidup

C. KEMENTERIAN...

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
<b>C. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
1.	Riset Karbon Laut di Indonesia	Terlaksananya 5 paket riset laut di Indonesia	2010-2014	Pesisir Indonesia dan Kawasan <i>Coral Triangle Initiatives (CTI)</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.	<i>Study Marine Hazard response to Climate Change in SEA Region</i>	Terlaksananya 2 paket riset <i>Hazard response to Climate Change in SEA Region</i>	2010-2012	Laut Cina Selatan dan Selat Karimata	Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.	Implementasi <i>Indonesia Global Ocean Observing System (INAGOOS)</i>	Terlaksananya 2 paket kegiatan <i>Indonesia Global Ocean Observing System (INAGOOS)</i>	2010-2014	Jakarta, Bali dan Perairan Indonesia	Kementerian Kelautan dan Perikanan
4.	Implementasi <i>Indo-China Ocean and Climate Reserach Centre</i>	Terselenggaranya riset di 3 lokasi terkait <i>Indo-China Ocean and Climate Reserach Centre</i>	2010-2014	Selat Sunda, Samudra Hindia, dan Selat Karimata	Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.	Penyusunan <i>Masterplan</i> (Rencana Zonasi Rinci) kawasan minapolitan dan Rencana Zonasi Nasional/lintas wilayah provinsi/kabupaten/kota	Tersusunnya 100 <i>Masterplan</i> (Rencana Zonasi Rinci) kawasan minapolitan dan 300 Rencana Zonasi Nasional/lintas wilayah provinsi/kabupaten/kota	2010-2020	50 kawasan minapolitan, 145 kawasan lintas wilayah provinsi/kabupaten/ kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan
6.	Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, vegetasi pantai, lamun, terumbu karang) di wilayah pesisir	Terlaksananya rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir seluas 300 ribu ha	2010-2020	Kawasan sentra produksi kelautan dan perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
7.	Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 9 juta ha	2010-2020	15 kawasan/ wilayah: Riau, Padang, Kupang, Makasar, Sorong, Jakarta, Serang, Bali, Mataram (Lombok Utara), Pontianak Banda (Maluku Tengah), Aru Tenggara, Pangkajene kepulauan, Biak, Raja Ampat; dan 45 kabupaten/kota lokasi KKP daerah	Kementerian Kelautan dan Perikanan
8.	Rehabilitasi di Kawasan Konservasi Perairan	Terlaksananya rehabilitasi di kawasan konservasi perairan seluas 9 juta ha	2010-2020	23 kawasan: Sumatra Barat, Mentawai, Sumatra Utara, Nias Barat/ Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kepulauan Riau, Bintan, Batam, Lingga, Natuna, Sulawesi Selatan, Pangkajene Kepulauan, Selayar, Sulawesi Tenggara, Buton, Wakatobi, NTT, Sikka, Papua Barat, Raja Ampat, Papua, dan Biak	Kementerian Kelautan dan Perikanan

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
<b>D. LINTAS BIDANG</b>					
1	Penyusunan <i>Nationally Appropriate Mitigation Actions</i> (NAMAs)	Tersusunnya 1 konsep NAMAs yang komprehensif	2010-2014	Nasional	Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
2	Penyusunan Strategi Pembangunan Rendah Karbon ( <i>Green Economic</i> )	Tersusunnya 1 paket Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2010-2014	Nasional	Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
3	Penyusunan Strategi Nasional untuk <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (REDD+)	Tersusunnya Strategi Nasional REDD+	2010-2011	Nasional	UKP4, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan
4	Pembentukan Badan Koordinasi Nasional REDD+	Terbentuknya Badan Koordinasi Nasional REDD+	2010-2011	Nasional	UKP4, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

5. Pembentukan...

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN/SASARAN	PERIODE	LOKASI	PENANGGUNGJAWAB
5	Pembentukan lembaga independen MRV untuk REDD+	Terbentuknya Lembaga independen MRV REDD+	2010-2011	Nasional	UKP4, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan
6	Pembentukan instrumen pembiayaan REDD+	a. Terbentuknya skema pembiayaan REDD+ b. Terbentuknya lembaga pembiayaan REDD+	2010-2011	Nasional	Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, UKP4

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti